

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2020**

Oleh : Rezita Mulyani

E-mail: rezitamulyanii@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The construction of the Integrated Domestic Waste Treatment System (SPALD-T) is expected to be completed by December 2020, but the construction of the project is not in accordance with the stipulated timeframe. This study aims to determine the policy implementation of what factors caused the implementation of the policy for the development of a Centralized Domestic Wastewater Management System in Pekanbaru City in 2019-2020 not as planned. The method used in writing this research is a qualitative approach. Meanwhile, the key informants used were 6 people. The method of data collection is by using interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusions. This research shows that: First: The implementation of the SPALD-T development has been quite implemented, this can be seen from several indicators, such as: 1) Ambiguity, the ambiguity problem occurs due to the length of time planning and implementation of the SPALD-T development, so that there have been many changes in the agency. Government, as well as environmental changes in each area that the pipeline network passes through. 2) Executors at the Frontline (implementing apparatus), the long time span between planning and implementation has also caused the implementers to have also undergone changes. 3) Funding and Resources. In addition, the funding and resources used are still not optimal, such as the human resources used are not much from the local area. Second: Obstacles in the implementation of the SPALD-T development are: Lack of socialization to the community, Planning for SPALD-T does not pay attention to the contours of the land that will be passed by the SPALD-T pipeline, In planning and timing of implementation also does not pay attention to weather conditions.

Keywords: Implementation, Centralized Domestic Wastewater Management System, Pekanbaru

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Proses pembangunan Nasional tentu saja memerlukan adanya kerja sama dan kebijakan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan perkembangan otonomi daerah yang berkembang di Indonesia. Salah satu kebijakan dan kerja sama yang dijalin antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah adalah terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah. Salah satu bentuk pembangunan sarana sanitasi masyarakat adalah dalam bentuk pembangunan *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP).

Pembangunan SPALD-T di Kota Pekanbaru bermula pada tahun 2010 yang diajukan oleh Walikota Saat itu adalah H. Herman Abdullah, dengan nama program *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP). Namun baru dapat terlaksana pada tahun 2019 Bulan November dan dianggarkan selesai pada akhir 2020, dengan istilah pembangunan SPALD-T.

Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) merupakan kegiatan dengan pendanaan kombinasi pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB), Hibah Pemerintah Australia, Dana Pemerintah Pusat (APBN) serta Dana Pemerintah Kota dan Provinsi (APBD). Dana pinjaman melalui ADB sebesar USD 120 juta yang terdiri atas dana *Original Capital Resources* (OCR) sebesar USD 80 juta dan dana *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) sebesar USD 40 juta serta dana hibah dari Pemerintah Australia, melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), sebesar USD 48,83 juta. Pada mulanya, kegiatan ini akan diselenggarakan di lima kota antara Cimahi, Jambi, Makassar, Palembang, dan Pekanbaru. Akan tetapi, diputuskan Kota Cimahi tidak diikutsertakan pada MSMIP karena belum siap sehingga menyisakan 4 kota yaitu Jambi, Makassar, Palembang, dan Pekanbaru.

MIMSP di Kota Pekanbaru meliputi Pembangunan IPAL Kota Pekanbaru dengan kapasitas 8.100 m³/hari, dan jaringan

perpipaan untuk melayani sekitar 11.000 Sambungan Rumah, dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

1. IPAL Kota Pekanbaru diperuntukan bagi sekitar 55.000 penduduk dan direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 8.100 m³/hari.
2. Sistem perpipaan air limbah Kota Palembang direncanakan mampu melayani 11.000 Sambungan Rumah (SR) dengan total panjang pipa jaringan mencapai 51.058 m.
3. Pengembangan jaringan air limbah Kota Pekanbaru dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan berdasarkan *catchment area*, diantaranya:
 - 1) Paket NC, dengan total panjang pipa 13.526 m;
 - 2) Paket SC-1, dengan total panjang pipa 19.693 m;
 - 3) Paket SC-2, dengan total panjang pipa 17.839 m.

Paket pertama, Pembangunan Perpipaan Air Limbah di Kota Pekanbaru Area Selatan (SC1) sepanjang 19,7 kilometer. Waktu pelaksanaan selama 780 hari kalender terhitung dari tanggal 9 November 2018 hingga selesai pada tanggal 27 Desember 2020. Kerjasama keduanya dilakukan melalui Kerjasama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp 203.7 miliar. Selesaiannya pekerjaan IPAL Kota Pekanbaru, maka akan menjangkau sanitasi masyarakat di tiga Kelurahan, yaitu Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Kampung Tengah, dan Kelurahan Jadirejo. Sedangkan untuk paket kedua, yakni Pembangunan Perpipaan Air Limbah di Kota Pekanbaru Area Selatan (SC2). PT Utama Karya dan PT Rosa Lisca menjadi kontraktornya. Paket sepanjang 17.8 Km ini senilai Rp 144.2 miliar. Ruang lingkup pekerjaannya sendiri berupa pekerjaan instalasi perpipaan bagi 11.000 SR di Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Sukajadi, dan Kelurahan Pulau Karoma. Pekerjaan pipa utama sepanjang 17.8 kilometer, dan *manhole*.

Proyek SPALD-T di Kota Pekanbaru merupakan suatu penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah yang bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi serta juga efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan atau yang lebih sering dikenal dengan konsep Dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisastie* atau *delegatie van bevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sebagaimana tertulis di undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (9) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum.

Dengan adanya pembagian tugas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan proyek SPALD-T sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun berdasarkan pada progress pelaksanaan pekerjaan proyek yang terdiri dari Paket SC 1 dan SC2, maka masih banyak pekerjaan yang masih belum terselesaikan atau terlaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan SPALD-T Pekanbaru belum sesuai dengan yang direncanakan. Kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan SPALD-T ini menandakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Pusat masih belum terlaksana dengan baik.

Sementara itu, menurut Allan McConnell, masalah utama yang menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan kebijakan adalah kebijakan sering kali memiliki tujuan ganda dan berpotensi bertentangan untuk dipenuhi. Misalnya,

pemotongan belanja publik ditambah dengan pajak tambahan yang dikerahkan untuk tujuan mengurangi utang dapat menimbulkan risiko kegagalan yang tinggi karena kesulitan dalam membangun koalisi dukungan yang diperlukan untuk tindakan tersebut (Michael Howlett, M Ramesh dan Xun Wu, 2015). Selanjutnya menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Signe, 2017) menyatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat pencapaian suatu kebijakan adalah terkait dengan ambiguitas, Pelaksana di Garis Depan (aparatur pelaksana), Pendanaan dan Sumber Daya.

Menurut Matland, dalam model *top-down*, kejelasan tujuan merupakan variabel independen penting yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Ketidakjelasan tujuan dipandang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpastian dan oleh karena itu sering menjadi penyebab kegagalan implementasi. Posisi *top-downer* cukup eksplisit kebijakan harus didorong ke arah kejelasan tujuan yang lebih besar (Signe, 2017).

Dengan demikian, maka untuk pembangunan SPALD-T ini harus jelas tujuan dan juga sarana yang akan digunakan dalam pembangunan. Karena kejelasan tujuan ini merupakan salah satu variabel penting dalam pencapaian keberhasilan kebijakan. Namun berdasarkan pada hasil penelurusan yang dilakukan terhadap pelaksanaan proyek SPALD-T ini, maka masih terjadi ambiguitas atau kurang jelasnya tujuan kebijakan pembangunan SPALD-T ini, serta masih kurang jelasnya sarana yang akan digunakan dalam pembangunan proyek ini. Hal ini terlihat dari masih adanya instansi pelaksana yang kurang mengerti tentang tujuan pelaksanaan pembangunan SPALD-T ini.

Selain itu, ambiguitas juga dapat dilihat dari tujuan pembangunan SPALD-T dengan visi dan misi Kota Pekanbaru. Dalam salah satu visi Kota Pekanbaru, yaitu: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan, dan

Industri (Olahan dan MICE). Selain itu, pembangunan SPALD-T ini kurang menggunakan sumber daya manusia (tenaga kerja setempat), sehingga tidak sejalan dengan visi Kota Pekanbaru yang berbasis ekonomi kerakyatan dan padat modal.

Selain itu, faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan SPALD-T ini adalah terkait dengan pelaksana di garis depan (aparatur pelaksana). Pelaksana di garis depan seringkali ada kesulitan untuk memperbaiki ketidaksinambungan yang ada antara bagaimana kebijakan dirumuskan dan bagaimana kebijakan itu sebenarnya dilaksanakan (Signe, 2017).

Pelaksana garis depan dalam pelaksanaan kebijakan SPALD-T ini adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman, merupakan instansi vertikal yang langsung bertanggung jawab kepada Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan SPALD-T. Namun yang menjadi masalah pada pelaksanaan kebijakan pembangunan SPALD-T ini adalah pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, seperti penelitian kontur tanah, luas area yang akan di bangun, kondisi lingkungan pembangunan SPALD-T, serta kebijakan lainnya terkait dengan pembangunan SPALD-T ini. Kondisi ini tentu saja menjadi penghambat proses pelaksanaan pembangunan, ketika terjadi masalah pada saat pembangunan. Selain itu, untuk pelaksanaan pembangunan, maka dilaksanakan oleh Perusahaan (Kontraktor) yaitu, Kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. Hutama Karya. Kontraktor tersebut tidak mengetahui dengan rinci kondisi tanah yang akan dibangun SPALD-T.

Faktor selanjutnya yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan SPALD-T ini adalah terkait dengan pendanaan dan sumber daya. Akses ke pendanaan dan sumber daya yang tersedia merupakan prasyarat untuk implementasi yang sukses. Meskipun pendanaan saja tidak akan menghasilkan

kesuksesan, namun tanpa pendanaan dan sumber daya seringkali tidak dapat memobilisasi aspek lain dari strategi implementasi. Pendanaan yang stabil merupakan kebutuhan instrumental untuk keberhasilan implementasi (Durlak dan DuPre 2008, 336). Pendanaan hibah satu kali lebih kecil kemungkinannya untuk menghasilkan program yang didukung secara konsisten daripada pendanaan yang berulang (Greenhalgh et al. 2004, 608). Entitas pendanaan harus menyadari bahwa implementasi yang berhasil membutuhkan waktu dan tidak menahan sumber daya (Signe, 2017).

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa proyek ini dibiayai dari kombinasi dari pinjaman *Asian Development Bank* (ADB), Hibah Pemerintah Australia, Dana Pemerintah Pusat (APBN) serta Dana Pemerintah Kota dan Provinsi (APBD). Dana pinjaman melalui ADB sebesar USD 120 juta yang terdiri atas dana *Original Capital Resources* (OCR) sebesar USD 80 juta dan dana *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) sebesar USD 40 juta serta dana hibah dari Pemerintah Australia, melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), sebesar USD 48,83 juta. Dengan demikian, maka proyek ini telah ditetapkan jumlah dana untuk pembangunannya. Namun, ketika pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kondisi di perencanaan, menyebabkan pelaksanaan pembangunan ini menjadi terhambat. Seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan SPALD-T dialihkan untuk pembiayaan penanggulangan bencana Covid-19. Selain itu, kondisi lingkungan proyek yang menyebabkan pihak kontraktor membutuhkan biaya lebih untuk melaksanakan proyek tersebut, karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan pada pemaparan terkait masalah implementasi kebijakan pembangunan SPALD-T di Kota Pekanbaru, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi**

Kebijakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020?
- b. Faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 tidak sesuai dengan yang direncanakan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan implementasi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 tidak sesuai dengan yang direncanakan

D. KERANGKA TEORI

menurut (Signe, 2017) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Ambiguitas

Whitman dan Yeager menyatakan ambiguitas ialah suatu hal atau kalimat yang memiliki interpretasi normal lebih dari satu. Ambiguitas ini bersifat mudah diragukan dan sulit dipahami orang lain karena memiliki arti ganda. Penyebab munculnya ambiguitas ini ialah intonasi yang tidak tepat, struktur kalimat yang

salah dan pemakaian kata yang memiliki sifat polisemi (Suwandi, 2011).

Tingkat ambiguitas dalam intervensi tertentu sering kali akan menentukan tingkat keberhasilan implementasi dan bagaimana hasil yang dapat direplikasi di berbagai lokasi (Matland 1995; Veronesi dan Keasey 2015, 563). Menurut Matland (1995), ada berbagai jenis ambiguitas, yang terbagi dalam dua kategori, “ambiguitas tujuan dan ambiguitas sarana. Dalam model top-down, kejelasan tujuan merupakan variabel independen penting yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Ketidakjelasan tujuan dipandang menyebabkan kesalahan pemahaman dan ketidakpastian dan oleh karena itu sering menjadi penyebab kegagalan implementasi. Posisi top-downer cukup eksplisit — kebijakan harus didorong ke arah kejelasan tujuan yang lebih besar” (Matland 1995, 158–59) (Signe, 2017)

b. Pelaksana di Garis Depan (Aktor Pelaksana Kebijakan Publik)

Aktor kebijakan publik adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. (Achmad Nur Fauzi, 2018). Sementara itu menurut (Sholih Muadi, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani, 2016) Aktor-aktor dalam formulasi dan pelaksana kebijakan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang dibuat dan berasal dari berbagai kalangan.

Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi pun memiliki peran yang berbeda dengan evaluasi rancangan kebijakan. Aktor-aktor dalam formulasi adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang dibuat dan berasal dari berbagai kalangan. Dalam formulasi paling tidak, stakeholders bisa berasal dari legislatif, eksekutif maupun kelompok

kepentingan. Ketiganya berada dalam kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan sedangkan dalam evaluasi rancangan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam eksekutif tetapi berasal dari tingkat Pemerintahan yang berbeda. (Sholih Muadi, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani, 2016)

Orang-orang yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik tersebut sebagai aktor formulasi kebijakan publik. Sebutan lain bagi aktor adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu kebijakan publik mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan teknis), maka para aktor formulasi kebijakan di setiap tingkat-tingkatan tersebut berbeda (Sholih Muadi, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani, 2016).

c. **Pendanaan dan Sumber Daya**

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia (Fauzi, 2004).

Rees (1990) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya yang kedua adalah harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut (Fauzi, 2004).

Akses ke pendanaan dan sumber daya yang tersedia merupakan prasyarat untuk implementasi yang sukses. Meskipun pendanaan saja tidak akan menghasilkan kesuksesan, tanpanya seringkali tidak dapat memobilisasi aspek lain dari strategi implementasi. Pendanaan yang stabil merupakan kebutuhan instrumental untuk keberhasilan implementasi (Meyers,

Duncan C., Joseph A. Durlak, and Abraham Wandersman., 2012).

Sumber Daya: keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang diperlukan diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Dengan demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan satu implementasi kebijakan (Leo Agustino, 2016).

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

pelaksanaan penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan implementasi

kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Sukajadi dan di seluruh Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dan bersangkutan dengan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik. Alasan atau pertimbangan di tetapkannya Kota Pekanbaru menjadi lokasi penelitian adalah karena proyek pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal ini salah satunya di tempatkan di Kota Pekanbaru, dan selanjutnya untuk pelaksanaannya diperlukan sinergi antar instansi Pemerintah daerah dengan Pemerintah pusat. Oleh karena itu, objek penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang di perlukan oleh seorang peneliti yang di peroleh dari sumber utama secara langsung. Mewawancarai langsung dengan pihak terkait yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang di angkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini. (Syahza, 2009). Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan meliputi tentang implementasi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi atau perusahaan dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data yang dicari yaitu sejarah Kota Pekanbaru, profil Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman.

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Dimana teknik prosedur *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Adapun sumber data tersebut adalah informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman	1
2	Kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. Utama Karya	2
3	Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru	1
4	Masyarakat Kota Pekanbaru	2
Jumlah		6

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi

6. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian ini termasuk data kualitatif yang lebih merupakan wujud kata-kata daripada deretan angka-angka. Analisis data kualitatif dilakukan melalui cara induktif, yakni pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi yang khusus. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) simpulan. (Basrowi dan Suwandi, 2008)

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi program SPALD-T telah belum terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti: 1) Ambiguitas, 2) Pelaksana di Garis Depan (aparatur pelaksana), 3) Pendanaan dan Sumber Daya. Permasalahan ambiguitas terjadi karena lamanya waktu perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan SPALD-T, sehingga sudah banyak terjadi perubahan instansi Pemerintahan, maupun perubahan lingkungan di setiap wilayah yang dilalui jaringan perpipaan. Rentang waktu yang lama antara perencanaan dan pelaksanaan juga menyebabkan para pelaksana juga telah mengalami perubahan. Selain itu pendanaan dan sumber daya yang digunakan masih kurang maksimal, seperti sumber daya manusia yang digunakan tidak banyak dari daerah setempat. Terakhir adalah terkait konflik, hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang program SPALD-T kepada masyarakat.
2. Kendala dalam Implementasi SPALD-T adalah: Ambiguitas tugas yang terjadi dapat menyebabkan masalah bagi instansi pemerintah pelaksana kebijakan. Keterlibatan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pembangunan SPALD-T tidak terlaksana dengan baik. Pendanaan dan sumber daya pada pembangunan SPALD-T masih belum efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari sisa-sisa material yang berserakan disekitar lokasi pembangunan SPALD-T.

G. SARAN

Adapun Saran yang dapat penulis sampaikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan wewenang

Pemerintah melalui Satuan Kerja Sarana Dan Prasarana Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Tingkatkan Komunikasi antar instansi Pemerintah yang terkait dengan pembangunan SPALD-T.
2. Gunakan Tenaga tempatan sesuai dengan keahlian mereka, sehingga masyarakat setempat merasakan manfaat dari pembangunan SPALD-T, dan menghindari penolakan dari masyarakat.
3. Untuk pembangunan SPALD-T berikutnya, tentukan daerah yang benar-benar memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat dan cenderung padat penduduk.
4. Permasalahan dengan masyarakat yang ingin bekerja di proyek SPALD-T, namun masyarakat tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kontraktor. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penolakan dari masyarakat.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur Fauzi, d. D. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *ejournal Universitas Diponegoro*, 1-18.
- Aida Fitria Zahrina, Suryadi, dan Suwondo . (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus pada Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11., 1832-1836.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghosh, B. (2012). Understanding Development Theory and Practice. *Discourses on Development*, 27-48.
- Leo Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Meyers, Duncan C., Joseph A. Durlak, and Abraham Wandersman. (2012). "The Quality Implementation Framework: A Synthesis of Critical Steps in the Implementation Process. *American Journal of Community Psychology*, 462-480.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Signe, L. (2017). Policy Implementation – A synthesis of the Study of Policy Implementation and the Causes of Policy Failure. *Policy Paper*, 1-28.
- Suwandi, S. (2011). *Semantik: Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahza, A. (2009). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: CV Witra Irzani.
- Wahab, S. A. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.